



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, M.T.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2026

Pihak Kedua,

ANDRA SONI

Pihak Pertama,

TRI NURTOPO, M.T.
NIP. 19660530 199003 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,70
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Unit	8
3	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	100

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	66.367.360.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.876.901.320
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.907.964.480
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	360.893.200
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.221.601.000
	JUMLAH	66.367.360.000

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

TRI NURTOPO, M.T.
NIP. 19660530 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verry Junanta, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Tri Nurtopo, MT

NIP: 19660503 199003 1 003

Pihak Pertama,



Verry Junanta, SE, M.Si

NIP. 196750616 200112 1 003

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Angkutan Darat	Persentase	61,59



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usep Hediana, S.Sos., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, UDARA DAN PERKERETAAPIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Tri Nurtopo, MT

NIP: 19660530 199003 1 003

Pihak Pertama,



Usep Hediana, S.Sos., M.M.

NIP: 19710325 199312 1 004

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Menurunnya angka kecelakaan pelayaran	Persentase penurunan angka kecelakaan pelayaran	Persentase	8,00
2	Meningkatnya pengelolaan perlintasan sebidang kereta api	Persentase Keselamatan di Perlintasan sebidang Kereta api yang ditangani	Persen	100,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teddy Hendra Pratama, S.STP., M.Si.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Tri Nurtopo, MT
NIP: 19660530 199003 1 003

Pihak Pertama,



Teddy Hendra Pratama, S.STP., M.Si.
NIP: 19830705 200112 1 002

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Meningkatnya pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Presentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Unit	86,02



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Suska Deswianto
:
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT
:
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Tri Nurtopo, MT
NIP: 19660503 199003 1 003

Pihak Pertama,



Drs. Suska Deswianto
NIP: 19691228 199203 1 002

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indeks	80,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Entis Basari Ilyas, S.Pd., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Tri Nurtopo, MT
NIP: 19660530 199003 1 003

Entis Basari Ilyas, S.Pd., M.M.
NIP: 19690408 199003 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Menurunnya daerah rawan kecelakaan	Presentase Daerah rawan kecelakaan yang ditangani	Nilai	40,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Nurtopo, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Tri Nurtopo, MT

NIP: 19660530 199003 1 003

Pihak Pertama,



Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.

NIP: 19850623 200912 1 002

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indeks	80,00
2	Terfasilitasnya pemeliharaan lampu penerangan jalan	Presentase Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Persen	27,26



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usep Hediana, S.Sos., M.M.

Jabatan : KEPALA SEKSI PERHUBUNGAN UDARA DAN PERKERETAAPIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usep Hediana, S.Sos., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, UDARA DAN PERKERETAAPIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Usep Hediana, S.Sos., M.M.
NIP: 19710325 199312 1 004

Pihak Pertama,



Usep Hediana, S.Sos., M.M.
NIP: 19710325 199312 1 004

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terlaksananya Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi yang tersusun	Dokumen	5,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen	5,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.221.601.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.221.601.000,00
2.15	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.221.601.000,00
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1.221.601.000,00
2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.221.601.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		1.221.601.000,00

Plt. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Perkeretaapian



Usep Hadiana, S.Sos., M.M.
NIP: 19710325 199312 1 004

Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian



Usep Hadiana, S.Sos., M.M.
NIP: 19710325 199312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah, S.Kom.

Jabatan : KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teddy Hendra Pratama, S.STP., M.Si.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Teddy Hendra Pratama, S.STP., M.Si

NIP: 19830705 200112 1 002

Pihak Pertama,



Rahmatullah, S.Kom.

NIP: 19740903 200112 1 006

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Layanan Transportasi (Persen)	Unit	100,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	374,00
3	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.111.384.620,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.111.384.620,00
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.111.384.620,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	7.111.384.620,00
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.917.115.620,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	194.269.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		7.111.384.620,00

Plt. Kepala Bidang Prasarana
dan Perlengkapan Jalan



Teddy Hendra Pratama, S.STP., M.Si.
NIP: 19830705 200112 1 002

Kepala Seksi Perlengkapan Jalan



Rahmatullah, S.Kom.
NIP: 19740903 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Gunawan, S.IP, S.Mn., M.M

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGANN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.
NIP: 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,



Rahmat Gunawan, S.IP, S.Mn., M.M
NIP: 19730706 200112 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Paket	0,00
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Unit	0,00
3	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Laporan	0,00
4	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Unit	0,00
Sasaran Sub Kegiatan				
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00
7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00
10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.634.379.830,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.634.379.830,00
2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.634.379.830,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.052.000,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.052.000,00
2.15.01.1.07		292.294.701,00

2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.294.701,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.845.393.129,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	3.785.393.129,00
2.15.01.1.08.0004	Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.640.000,00
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.640.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		4.634.379.830,00

Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana
Perhubungan,



Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.
NIP: 19850623 200912 1 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Pengelolaan Prasarana Perhubungan,



Rahmat Gunawan, S.IP, S.Mn., M.M
NIP: 19730706 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iman Wahyu, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA SEKSI KEPELABUHAN DAN ASDP

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usep Hediana, S.Sos., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, UDARA DAN PERKERETAAPIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG 27 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Usep Hediana, S.Sos., M.M.

NIP: 19710325 199312 1 004

Iman Wahyu, S.E., M.Si.

NIP: 19750626 200112 1 003

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terlaksananya semua jenis perizinan sesuai kewenangan provinsi pada penyelenggaraan angkutan laut	Jumlah Laporan semua jenis perizinan sesuai kewenangan provinsi pada penyelenggaraan angkutan laut	Laporan	2,00
2	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1,00
Sasaran Sub Kegiatan				
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	2,00
4	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1,00
5	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	360.893.200,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	360.893.200,00
2.15	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	360.893.200,00
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	113.753.000,00
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	113.753.000,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	247.140.200,00
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	176.365.000,00
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	70.775.200,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		360.893.200,00

Plt. Kepala Bidang Perhubungan
Laut, Udara dan
Perkeretaapian



Usep Hadiana, S.Sos., M.M.
NIP: 19710325 199312 1 004

Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP



Iman Wahyu, S.E., M.Si.
NIP: 19750626 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Tubagus Aan Andriawan, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suska Deswianto

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Pertama,



H.Tubagus Aan Andriawan, SE, M.Si

NIP. 19770703 200902 1 001

Pihak Kedua,



Drs. Suska Deswianto

NIP. 19691228 199203 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Dokumen	2,00
2	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	Orang/Bulan	0,00
3	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Laporan	100,00
4	Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Orang/Bulan	100,00
5	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Paket	100,00
6	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Unit	0,00
7	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Laporan	100,00
8	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Unit	100,00
Sasaran Sub Kegiatan				
9	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00
10	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00
11	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00
12	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00
13	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00
14	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00
15	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00
16	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	331,00
17	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00
18	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00
19	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12,00
20	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
21	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00
22	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00
23	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00
24	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1,00
25	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00
26	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00
27	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00
28	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00
29	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00
30	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00
31	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00
32	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1,00
33	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00
34	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00
35	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00
36	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35,00
37	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24,00
38	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	117,00
39	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.242.521.490,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	42.242.521.490,00
2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.242.521.490,00
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.904.000,00
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.839.000,00
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.690.000,00
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	7.690.000,00
2.15.01.1.01.0004	SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.690.000,00
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.690.000,00
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00
2.15.01.1.01.0007		80.305.000,00
2.15.01.1.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.736.243.000,00
2.15.01.1.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.149.103.000,00
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	481.550.000,00
2.15.01.1.02.0004	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.140.000,00
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000,00
2.15.01.1.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.100.000,00
2.15.01.1.02.0007	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.464.000,00
2.15.01.1.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.886.000,00
2.15.01.1.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000,00
2.15.01.1.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00
2.15.01.1.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.320.000,00
2.15.01.1.05.0009	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.320.000,00
2.15.01.1.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	680.820.000,00
2.15.01.1.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.000.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.000.000,00
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.820.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00
2.15.01.1.06.0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00
2.15.01.1.06.0011	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00
2.15.01.1.07	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	239.500.000,00
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.500.000,00
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Mebel	100.000.000,00
2.15.01.1.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.526.037.290,00
2.15.01.1.08.0002		555.407.290,00
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.970.630.000,00
2.15.01.1.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.678.697.200,00
2.15.01.1.09.0001		400.000.000,00
2.15.01.1.09.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.677.200,00
2.15.01.1.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00
2.15.01.1.09.0011	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.020.000,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
	TOTAL ANGGARAN Rp.	42.242.521.490,00

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Drs. Suska Deswianto
NIP. 19691228 199203 1 002

Pihak Pertama,



H.Tubagus Aan Andriawan, SE, M.Si
NIP. 19770703 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Herlambang, S.T., M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Verry Junanta, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Verry Junanta, SE, M.Si
NIP: 19750616 200112 1 003

Erik Herlambang, S.T., M.M.
NIP: 19700827 200112 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen rencana induk yang telah disusun	Dokumen	0,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1,00
3	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	200.000.000,00
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	200.000.000,00
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000,00
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100.000.000,00
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100.000.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		200.000.000,00

SERANG, 27 Januari 2026

Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi

Kepala Seksi Pengembangan Transportasi



Verry Junanta, SE, M.Si
NIP: 19750616 200112 1 003



Erik Herlambang, S.T., M.M.
NIP: 19700827 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sufrianto Assagaf, SE

Jabatan : PLT. KEPALA SEKSI SARANA PERHUBUNGAN DARAT DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN UPTD PRASARANA PERHUBUNGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 27 Januari 2026

Pihak Kedua,



Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.
NIP: 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,



Sufrianto Assagaf, SE
NIP: 19850623 200912 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	750.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	750.000.000,00
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	750.000.000,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	750.000.000,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	750.000.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		750.000.000,00

Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan



Bayu Adi Putranto, S.E., M.M.
NIP: 19850623 200912 1 002

Plt. Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan UPTD Prasarana Perhubungan



Sufrianto Assagaf, SE
NIP: 19850623 200912 1 002